

ABSTRAK

Peredaran gelap narkoba yang memiliki organisasi yang rapih serta menggunakan modus operandi tinggi dan canggih saat ini, telah mampu menjangkau berbagai kalangan profesi seperti Anggota Polisi, Anggota DPRD, Swasta (dagang, Sopir truk antar propinsi, Nelayan, Tukang kayu, bahkan Pelajar dan Mahasiswa, apalagi terungkap pabrik psikotropika jenis sabu-sabu di Jepara.

Aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam melaksanakan fungsi penegakan hukumnya terhadap masyarakat penyalahguna narkoba baik dalam hal pengungkapan (penyelidikan) maupun penyelesaian kasusnya (tahap penyidikan) ternyata tidaklah mudah karena jaringan narkoba menggunakan teknik ranjau, Teknik ranjau yang dimaksud dalam hal ini pihak polisi dan kurir tidak saling bertemu secara langsung, karena baik bandar maupun kurir jaringan tersebut tidak ingin bertemu dengan polisi sehingga dalam melakukan pembelian terselubung polisi sering gagal, kemudian Kendala menentukan lokasi pembelian terselubung karena penyidik harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik tersangka dan kemungkinan dilakukannya pengamanan terhadap pelaku undercover, uang transaksi dan menghindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka, tidak banyak tempat yang bisa digunakan untuk melakukan operasi ini sehingga rumusan masalah yang dapat dikemukakan terkait dengan fenomena hukum tersebut yaitu :

1) Upaya penegakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana narkoba oleh Polres Jepara, dan 2) Kendala Polres Jepara dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat oleh Polres Jepara terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Polres Jepara dalam mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba khususnya di wilayah hukum Polres Jepara

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Sosiologis, Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, Meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

Kendala yang dialami oleh Polres Jepara dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor budaya hukum, kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan kegagalan sistem peradilan pidana di Indonesia. Optimalisasi penegakan hukum oleh Polres Jepara terhadap pelaku peredaran gelap narkoba di kalangan masyarakat meliputi upaya intern dan ekstern, dimana upaya intern dilakukan dengan mengoptimalkan kemampuan dan keterampilan personel, sedangkan upaya ekstern meliputi peningkatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar lembaga penegak hukum.

Kata Kunci : Kebijakan, Hukum Pidana, Narkoba.

ABSTRACT

Illicit trafficking of narcotics which have an organization that neat and use the mode operand of the high and powerful at this time has been able to reach a wide range of professions such as Police, Members of Parliament, the private sector trade, driver of the truck between provinces, fisherman, carpenter, and even students, moreover revealed factory psychotropic types of methamphetamine in Jepara.

Law enforcement officials, especially the police in carrying out the functions of law enforcement to the people involved in the illicit trafficking of narcotics both in terms of disclosure (investigation) as well as the completion of the case (the investigation stage) was not easy given the network of drug use engineering mines, Engineering mines in question in this case the police and couriers do not meet each other in person because neither the city nor the couriers such networks do not want to meet with police so that in the purchase of covert police often fail, then constraints determine the location of purchase disguised as investigators must looking for a location that allows execution of monitoring of the movements of suspects and possible execution of safeguards against perpetrators undercover, money transactions and avoid places that are too crowded and open, not many places that can be used to perform this operation so that the formulation of the problem that could be addressed related to legal phenomena These are :

1) Efforts criminal law enforcement in combating narcotic crime by the Police Jepara, and 2) Constraints Police Jepara in the implementation of law enforcement against illicit trafficking in the community by the Police Jepara against the perpetrators of illicit trafficking in the community and what is being done by Jepara Police optimize law enforcement against illicit trafficking offenders, especially in Jepara district police jurisdiction in this study, using a type of research Juridical Sociological, Juridical Sociological is legal research using secondary data as the data initially, followed by primary data or data field, examine the effectiveness of a Law and Research who want to find a relationship (correlation) between the various symptoms or variable as a means of collecting data consisted of document study, observation and interviews.

Obstacles the experience posted Police Jepara hearts Implementation of law enforcement against perpetrators circulation of Illicit Narcotics Among ' society include legal factors, factors Law enforcement, factor ' society, factors means or facilities Supporting cultural factors laws, legal awareness, legal compliance, and System Failure criminal justice in Indonesia. Optimization of law enforcement posted Police Jepara actors against Illicit Narcotics Among circulation ' community includes internal and external efforts, where efforts intern conducted with optimize the capabilities and personal skills, while the external efforts include enhanced functions Coordination and cooperation between law enforcement agencies.

Keywords : Criminal Law, Policy, Drugs.